

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia bukanlah hal yang baru karena semenjak tahun 2001 Indonesia telah menerapkannya. Dengan diterapkannya otonomi daerah otomatis pemerintah daerah harus bisa mampu mengelola dan menata keuangan daerahnya sendiri. Hal tersebut diperoleh berdasarkan keperluan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap daerah yang bersangkutan. Selain itu otonomi daerah seharusnya dapat berdampak baik kepada masyarakat dengan cara menciptakan pelayanan umum yang utuh sehingga masyarakat mampu merasakan manfaatnya, ini termasuk dari adanya asas desentralisasi.

Peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga berbunyi, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dan mengharuskan pada pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*Money Follows Function*).

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan bagaimana perkembangan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan nasional atau penambahan output dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun. Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain seperti, tanah dan kekayaan, kualitas tenaga kerja dan penduduk, barang modal dan teknologi, serta system sosial dan masyarakat.

Menurut Sukirno (2001), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Dampak jangka panjang inilah yang menjadi salah satu tujuan yang sangat penting bagi pemerintah pusat maupun daerah karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan, serta sebagai dasar perencanaan atau pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ukuran keberhasilan negara, sebab pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan indikator pembangunan ekonomi.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Dimana didalamnya berisi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri serta pemerintah pusat wajib mentransfer dana perimbangan yang berupa DAU, DAK dan sumber penerimaan sendiri yang berupa PAD. Ketiganya yang merupakan komponen pendapatan daerah yang akan digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan belanja daerahnya. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri

dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan sesuai perrundang-udangan (PP No. 58 Tahun 2005), dengan begitu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat sehingga meningkatkan gairah ekonomi suatu daerah.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat juga Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Zainuddin, 2012). Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam prioritas nasional. Dalam beberapa tahun berjalan proporsi DBH terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyusunan anggaran mempunyai peranan sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal

dialokasikan dengan tepat. Adanya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yang berupa peralatan, bangunan infrastruktur, dan harta tetap lainnya merupakan suatu bentuk pengalokasian belanja modal. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana fasilitas publik sebagai penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena belanja modal yang besar akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan daerahpun semakin baik dalam hal menggerakkan roda perekonomian.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat dimana dapat meningkatkan kemampuan suatu kegiatan investasi.

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja modal berarti Pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan anggaran belanja modal erat hubungannya dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan Pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan Masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Puspitasari, 2012).

Pembangunan suatu daerah dapat diketahui juga melalui pembangunan ekonominya. Sehingga pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai adanya proses naiknya hasil (output) perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan

kesejahteraan dengan mengkonsumsi produk barang dan jasa serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan daerah, pengembangan potensi daerah yang berbeda-beda pula. Salah satu daerah di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah provinsi Jambi yang berada di bagian barat Indonesia. Provinsi Jambi yang memiliki 11 pemerintahan kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi menjadi perhatian bagi setiap daerah. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya. Untuk pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota di Jambi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing melalui pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sarana dan prasarana yang dibelanjai daerah melalui belanja modal.

Jambi merupakan salah satu provinsi yang tingkat pertumbuhannya selalu mengalami kenaikan secara signifikan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, laju pertumbuhan ekonomi Jambi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1. Laju pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen) Tahun 2017-2023**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Kerinci	5.86	4.93	4.35	3.81	3.89	4.43	4.87
2	Merangin	5.39	4.93	4.25	0.78	5.24	5.72	6.00
3	Sarolangun	4.68	4.80	4.26	-0.25	6.61	6.73	5.15
4	Batang Hari	4.81	4.83	5.07	-0.43	4.85	12.27	4.29
5	Muaro Jambi	4.95	5.01	4.79	0.35	4.06	7.97	3.27
6	Tanjung Jabung Timur	3.07	2.94	4.21	-3.44	0.14	0.57	2.11
7	Tanjung Jabung Barat	4.48	6.77	5.01	-0.29	1.36	2.56	3.21
8	Tebo	5.58	4.98	4.76	-0.03	4.30	6.30	4.11
9	Bungo	5.68	4.65	4.19	-0.48	4.99	4.73	3.46
10	Kota Jambi	4.68	5.30	4.73	-4.24	4.08	5.36	4.35
11	Kota Sungai Penuh	6.02	4.88	5.01	-0.16	3.67	4.45	3.84
12	Provinsi Jambi	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66

*Sumber: BPS Provinsi Jambi (2023)*

Dari tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2018-2022 sangat bervariasi terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota berkisar sebesar 3,72 persen perkabupaten/kota. Efek dari adanya pandemi Covid-19 sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan di tahun 2020 hingga pertumbuhan ekonomi berada pada angka rata-rata minus, namun pada tahun berikutnya laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jambi



mengalami kenaikan kembali. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diberikan oleh kabupaten Batanghari sebesar 5,32 persen dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah diberikan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,88 persen. Dari beragamnya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi membuat pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus melakukan perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah masing-masing dengan meningkatkan factor-faktor pertumbuhan ekonomi yang ada dikabupaten masing-masing.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ini tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang terus melakukan perkembangan peningkatan realisasi belanja modal yang terlihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Povinsi Jambi Tahun  
2017-2023 (dalam juta rupiah)**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Kerinci	201,86	191,87	294,61	216,76	159,73	138,35	151,35
2	Merangin	291,19	208,24	247,00	274,67	351,43	115,37	205,80
3	Sarolangun	218,17	215,17	346,69	247,73	164,76	194,99	194,64
4	Batang Hari	186,02	148,21	274,05	150,46	195,87	177,30	186,23
5	Muaro Jambi	401,87	292,28	272,56	262,78	299,93	245,19	218,74
6	Tanjung Jabung Timur	194,06	312,96	327,41	229,22	253,27	237,36	252,97
7	Tanjung Jabung Barat	307,46	419,66	531,08	353,97	217,63	212,94	214,88
8	Tebo	242,05	258,99	260,65	139,85	149,40	244,73	172,33
9	Bungo	127,65	203,21	305,67	153,99	100,48	45,80	69,22
10	Kota Jambi	386,02	469,33	550,20	444,35	742,65	375,46	560,80
11	Kota Sungai Penuh	168,86	194,68	173,35	134,64	151,94	137,44	127,75
12	Provinsi Jambi	1.011,12	993,99	939,17	1.056,50	261,41	675,75	910,53

*Sumber: DJPK Kementerian Keuangan*

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terjadi sangat bervariasi setiap tahunnya, masing-masing memberikan realisasi Belanja Modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-

masing. Dimana realisasi belanja modal tertinggi bersumber dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata realisasi belanja modalnya sebesar 451.33,2 miliar rupiah pertahunnya, sedangkan realisasi belanja modal terendah berasal dari Kabupaten Bungo dengan rata-rata realisasi belanja modal sebesar 162.09,4 miliar rupiah pertahunnya.

Melihat perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan menuangkannya kedalam penulis Tesis dengan judul **“Determinan Belanja Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Persoalan Pemerintah Daerah khususnya diwilayah Provinsi Jambi adalah ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi terhadap transfer dari Pemerintah Pusat berupa DAU atau DAK. Soleh dan Rochmansyah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih dinominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan proporsi Belanja modal masih relative kecil.

Oleh karena itu perlu diketahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dan pengaruhnya terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris atas factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran Belanja Modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, dan dapat dijadikan bahan evaluasi awal bagi semua pihak yang ingin mengkaji pelaksanaan otonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Belanja Modal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.